

**Evaluasi Program Penanganan Prasarana Dan Sarana Umum (PPSU)
Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja
Kota Jakarta Utara**

***Evaluation Of Public Infrastructure And Facilities Handling Program
(PPSU) On Waste Management In Lagoa Urban Village, Koja Sub-District,
North Jakarta City***

**Fanisyah Salsabila Octavianti, Joko Tri Nugraha, Matheus Gratiano Mali, Eny Boedi
Orbawati**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar Magelang

Email: fanisyah.salsabila.octavianti@students.untidar.ac.id

Naskah diterima tanggal 7 Mei 2024. Naskah direvisi tanggal 28 Juni 2024.

Naskah disetujui tanggal 28 Juni 2024.

Abstrak

Penumpukan sampah di DKI Jakarta masih menjadi masalah serius yang terus meningkat. Program PPSU telah menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan DKI Jakarta, termasuk di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. Evaluasi Program PPSU menjadi penting untuk mengidentifikasi kesesuaian program, manfaat, dampak, dan hambatan program yang nantinya menjadi dasar untuk perumusan strategi dan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak pelaksanaan program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa menggunakan salah satu teknik evaluasi menurut teori Finsterbusch dan Motz yaitu, single program *before-after* dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa telah mengalami perubahan secara signifikan setelah diterapkannya program PPSU. Perubahan-perubahan ini memiliki dampak berkelanjutan seperti peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko banjir, peningkatan kenyamanan masyarakat, serta infrastruktur berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, beberapa tantangan juga ditemui dalam pelaksanaan program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan evaluasi untuk menyempurnakan program PPSU di masa depan.

Kata Kunci: Evaluasi Program; PPSU; Pengelolaan Sampah

Abstract

Waste accumulation in DKI Jakarta is still a serious problem that continues to increase. The PPSU program has become one of the keys in waste management at the DKI Jakarta urban village level, including in Lagoa Urban Village, Koja District, North Jakarta City. Evaluation of the PPSU Program is important to identify program suitability, benefits, impacts, and barriers of the program which will be the basis for formulating better strategies and policies in the future. This study aims to analyze and describe the impact of the implementation of the PPSU program on waste management in Lagoa Village using one of the evaluation techniques according to Finsterbusch and Motz's theory, namely, a single before-after program by comparing the situation before and after program implementation. This research uses a qualitative approach with a case study research type. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. This study aims to analyze and describe the impact of the implementation of the PPSU program on waste management in Lagoa Village using one of the evaluation techniques according to Finsterbusch and Motz's theory, namely, a single before-after program by comparing the situation before and after program implementation. This research uses a qualitative approach with a case study research type. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The research findings show that waste management in Lagoa Village has undergone significant changes after the implementation of the PPSU program. These changes have sustainable impacts such as improved public health, reduced flood risk, increased community comfort, and sustainable infrastructure that can be utilized. In addition, several challenges were also encountered in the implementation of the PPSU program on waste management in Lagoa Village.

Keywords: Program Evaluation, PPSU, Waste Management

PENDAHULUAN

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Jakarta Dalam Angka Tahun 2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa, Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki luas wilayah 660,98 km² yang terbagi menjadi 5 wilayah kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Wilayah tersebut terbagi atas 44 kecamatan yang terdiri dari 267 kelurahan ([BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024](#)). Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan aktivitas perkotaan yang padat telah menyebabkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan di Provinsi DKI Jakarta. Fenomena ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu provinsi penghasil sampah terbanyak di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 ini:



Sumber: KLHK, 2022

Gambar 1. Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia

Dari grafik data KLHK di atas, pada Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat kedua di Indonesia sebagai penghasil sampah terbanyak. Dari data KLHK tadi juga dapat diketahui bahwa, DKI Jakarta memproduksi sebanyak 3,11 juta ton sampah, atau 1,14 juta ton lebih sedikit dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan 4,25 juta ton sampah. Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan 1,63 juta ton sampah berada di peringkat ketiga. Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan 1,11 juta ton sampah berada di peringkat keempat. Selanjutnya, Provinsi Riau menghasilkan 1,05 juta ton sampah berada di peringkat kelima. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kemudian melaporkan hingga akhir tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta menghasilkan lebih dari 7.500 ton sampah per hari ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang ([Khasanah, 2023](#)).

Meningkatnya aktivitas perekonomian dan jumlah penduduk di Jakarta yang berpengaruh pada pemakaian bahan kemasan dan konsumsi barang tidak lepas dari fenomena meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DKI Jakarta telah mencapai 10,67 juta jiwa pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 0,28% (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024). Di samping itu, gaya hidup masyarakat di wilayah metropolitan juga berkontribusi terhadap peningkatan produksi sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah dan infrastruktur yang terdapat di Jakarta harus menghadapi serta mengatasi hambatan yang signifikan untuk mengelola jumlah sampah Jakarta yang terus bertambah. Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap peringkat Jakarta sebagai salah satu provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemilahan sampah dan akses terhadap fasilitas pengelolaan sampah yang baik, sehingga hal

ini mempengaruhi kualitas lingkungan. Pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Salah satu elemen utama dalam menjaga kualitas dan kebersihan lingkungan ialah pengelolaan sampah yang efektif ([Hildawati, 2018](#)). Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah dengan membuat suatu program kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Peraturan tersebut kemudian disempurnakan sebanyak dua (2) kali, yaitu: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2017 ([Pergub Prov DKI Jakarta No.122 Tahun 2017, 2017](#)). Inisiatif ini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya merancang aturan yang dapat mempercepat operasional sarana dan prasarana umum, dimana salah satunya ialah pengelolaan sampah. Kebijakan strategi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ini dijalankan pada tingkatan kelurahan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk di Kota Jakarta Utara.

Wilayah Jakarta Utara terdapat 6 kecamatan dan 31 kelurahan dan memiliki timbulan sampah harian sebanyak 1,368 ton ([SIPSN MLHK, 2023](#)). Kelurahan Lagoa merupakan salah satu kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Koja, dimana merupakan wilayah Ibu Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjalankan kebijakan program PPSU dari Tahun 2015. Kelurahan Lagoa memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 15.799 km² dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 76.576 jiwa ([BPS Kota Jakarta Utara, 2022](#)). Kelurahan Lagoa memiliki 18 Rukun Warga (RW) dan 222 Rukun Tetangga (RT). Mengingat kebijakan program PPSU telah berjalan selama 9 tahun, evaluasi kebijakan terhadap program PPSU menjadi penting guna mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan program ini, permasalahan, dan tantangan dalam melakukan pengolahan sampah di Kelurahan Lagoa. Evaluasi ini juga dapat memberikan informasi, rekomendasi atau masukan yang berharga bagi pemerintah dan *stakeholders* terkait dalam perancangan kebijakan dan strategi serta pengambilan keputusan program PPSU terkait pengembangan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat kelurahan.

Penelitian mengenai evaluasi pengelolaan sampah sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, mengingat bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan penting di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ([Wandira, 2022](#)) mengenai Evaluasi Program Pengolahan Bank Sampah menyatakan bahwa,

dengan menggunakan indikator sesuai dengan teori Wirawan berfungsi dengan baik di Kelurahan Sigara-Gara karena masyarakat setempat telah mematuhi 7 proses Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2013 yang menguraikan pedoman pelaksanaan 3R. Selanjutnya, penelitian ([Karolyn, 2021](#)) mengenai Implementasi Kebijakan PPSU menyatakan bahwa, persepsi masyarakat bahwa PPSU hanyalah pegawai yang digaji dan tanggung jawabnya hanya membersihkan lingkungan menjadi penyebab rendahnya keterlibatan masyarakat. Persepsi ini menimbulkan ketergantungan dan mengurangi minat masyarakat untuk aktif menjaga wilayahnya. Kemudian, penelitian ([Ariawan et al., 2020](#)) mengenai Evaluasi Program Bank Sampah menyatakan bahwa, dengan penggunaan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) pada kuadran II (+-++), yang berarti konteks bernilai positif, input bernilai negatif, proses bernilai positif, dan produk bernilai positif. Maka Program Bank Sampah Sibuh Nirmala di Kelurahan Kedisan sangat efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa dengan melihat perbedaan kondisi sebelum dan sesudah penerapan program PPSU. Penelitian ini berfokus kepada analisis dampak program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa, termasuk mengidentifikasi manfaat dan kendala pelaksanaan program. Kelurahan Lagoa dipilih menjadi lokasi penelitian karena kondisi demografi penduduknya, objek penelitian di lokasi ini distribusinya cukup merata serta terdapat sektor ekonomi yang cukup padat sebagai penyumbang sampah seperti perdagangan, industri, bangunan, dan sebagainya. Perbedaan penelitian ini dengan riset-riset sebelumnya adalah riset sebelumnya banyak yang mengidentifikasi hasil evaluasi dari beberapa program terkait pengelolaan sampah, namun belum ada yang meneliti terkait program PPSU sehingga penelitian ini memilih program PPSU untuk dilakukan evaluasi.

Hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian ini karena belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji evaluasi program PPSU dalam konteks pengelolaan sampah, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan memperluas pemahaman tentang evaluasi program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah terhadap perencanaan atau perbaikan pelaksanaan program PPSU dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks dan beragam, yang melibatkan berbagai metodologi dan pertimbangan. [Trevisan \(2008\)](#) memberikan gambaran yang komprehensif tentang bidang ini, membahas dimensi historis dan teoritisnya, serta penerapan meta-evaluasi. [Venetoklis \(2002\)](#) berfokus pada metodologi kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi retrospektif, menekankan pentingnya pemahaman pejabat publik tentang metode ini. [Vedung \(1997\)](#) dan [Palmer \(1999\)](#) keduanya menggarisbawahi peran evaluasi dalam memantau dan menilai kegiatan pemerintah, dengan Vedung membahas berbagai model dan pendekatan untuk evaluasi, dan Palmer menyoroti perlunya ilmu pengetahuan dan penelitian sosial dalam proses ini. Studi-studi ini secara kolektif menyoroti pentingnya pendekatan menyeluruh dan terinformasi dengan baik untuk evaluasi kebijakan publik.

Menurut Teori Briant & White dalam ([Wibawa, 1994](#)), mengemukakan bahwa, “pada dasarnya, evaluasi kebijakan harus mampu menggambarkan seberapa selaras kebijakan publik dengan pelaksanaannya dalam mencapai tujuan”. Teori Bryant & White ini memfokuskan evaluasi atau penilaian kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dievaluasi konsekuensi yang dihasilkan dan sebesar mana dampaknya. Menurut Teori Dunn ([Dunn, 2003](#)) memaparkan bahwa, “evaluasi merupakan penilaian yang memberikan angka (*rating*), penilaian yang memberikan penaksiran (*appraisal*), dan menganalisis hasil suatu kebijakan tertentu. Evaluasi lebih khusus difokuskan pada perolehan data mengenai nilai atau keuntungan dari hasil kebijakan”.

Adapun 4 kategori yang digunakan oleh Lester dan Steward dalam ([Akbar & Mohi, 2015](#)) untuk mengelompokkan evaluasi kebijakan, yaitu sebagai berikut ini:

1. Evaluasi Program. Evaluasi yang berhubungan dengan proses implementasi kebijakan program.
2. Evaluasi Dampak. Evaluasi yang berhubungan dengan dampak dan/atau hasil implementasi kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan. Evaluasi untuk menentukan apakah hasil kebijakan sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Evaluasi Meta. Evaluasi yang berhubungan dengan pemeriksaan beberapa implementasi kebijakan saat ini untuk mengidentifikasi kesamaan.

Penelitian ini berfokuskan kepada evaluasi program. Program yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi lain merupakan salah satu bidang evaluasi kebijakan. Evaluasi program merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menerapkan data untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai suatu program. Evaluasi program ialah hasil dari proses pengumpulan data, yang menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai program di masa yang akan datang. Evaluasi program berarti segala tindakan apa pun yang diambil dengan tujuan mencapai tujuan program atau menghasilkan manfaat. Subjek evaluasi program dapat dilaksanakan pada salah satu atau seluruh komponen implementasi program. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program berhasil mencapai tujuannya. Tujuan evaluasi program ialah sebagai penyedia data dan informasi yang diberikan, serta saran untuk pengambilan keputusan di masa depan mengenai kelanjutan, perbaikan, atau penghentian program. Adapun menurut teori Finsterbusch dan Motz dalam ([Mustari, 2015](#)) terdapat 4 teknik evaluasi program, yaitu seperti pada tabel di bawah:

Tabel 1.
Teknik Evaluasi Program

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yang Diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
<i>Single Program After-Only</i>	Tidak	Ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>Single Program Before-After</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>Comparative After-Only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol
<i>Comparative Before-After</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap kelompok sasaran dan kelompok kontrol

Sumber: Mustari, 2015

Penelitian ini menggunakan teknik evaluasi *Single Program Before-After*. Tujuan dari evaluasi ini ialah untuk mengidentifikasi dampak program dengan melihat keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program tersebut dilaksanakan. Dalam membantu evaluasi program terdapat indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator-indikator tersebut dilihat dari indikator strategi nasional pengelolaan sampah menurut PERPES No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ([PERPES No.97 Tahun 2017](#)) dan indikator evaluasi program kebijakan menurut Dunn ([Dunn, 2003](#)), yakni sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Evaluasi Program

Indikator	Pertanyaan
Pengelolaan Sampah	Bagaimana pengelolaan sampah sebelum dan sesudah Program PPSU?
Ketepatan	Apakah hasil (sasaran) yang diharapkan benar-benar berguna atau berharga?

Sumber: PERPES No. 97 (2017) dan Dunn (2003)

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)

Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di tingkat Kelurahan merupakan pekerjaan yang harus secepatnya dilaksanakan dan tidak dapat dilalaikan karena dapat menimbulkan kerusakan, bahaya, kerugian atau gangguan terhadap kepentingan masyarakat atau publik di wilayah kelurahan. Hal ini juga harus diselesaikan dengan cepat untuk menjamin berfungsinya prasarana, sarana, aset umum, atau aset daerah yang kotor, rusak, atau mengganggu di lokasi tersebut sesuai dengan peruntukannya ([PERGUB Prov DKI Jakarta No.169 Tahun 2015](#)). Inisiatif ini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya merancang aturan yang dapat mempercepat operasional sarana dan prasarana umum, khususnya ialah pengelolaan sampah. Kebijakan strategi PPSU ini dijalankan pada tingkatan kelurahan, karena kelurahan adalah instansi pemerintah yang menyediakan layanan dasar serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Meskipun petugas PPSU atau yang lebih dikenal dengan pasukan oranye ini sering kali terlihat bergerak di dalam pengelolaan sampah, akan tetapi terdapat banyak lainnya yang juga dilaksanakan oleh pasukan oranye ini. Adapun ruang lingkup pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan, yaitu:

1. Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan, meliputi penanganan jalan yang dimaksud yakni, perbaikan jalan berlubang, perbaikan pembatas jalan yang rusak, pengecatan kantin, dan perbaikan trotoar jalan yang rusak.
2. Penanganan Prasarana dan Sarana Saluran, meliputi penanganan saluran yakni, mengeringkan saluran-saluran, memperbaiki saluran-saluran yang rusak, membersihkan saluran-saluran air, dan melaporkan pembangunan atau kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi mengganggu saluran-saluran air.
3. Penanganan Prasarana dan Sarana Taman, meliputi penanganan taman yakni, menebang rumput liar dan semak belukar, memotong dahan pohon yang menghalangi rambu lalu lintas, lampu jalan, dan membahayakan keselamatan, mengangkut pot yang

rusak, menjaga Ruang Terbuka Hijau, dan penebangan pohon tanpa persetujuan perangkat daerah seperti Dinas Kehutanan Kota Provinsi DKI Jakarta.

4. Penanganan Prasarana dan Sarana Kebersihan, meliputi penanganan kebersihan yakni, pengelolaan sampah, penyapuan jalan, membersihkan timbunan atau gundukan sampah dan grafiti liar yang melanggar hukum, serta pembersihan jalan dan saluran mikro.
5. Penanganan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan Umum, meliputi penanganan penerangan jalan umum yakni, perawatan lampu rusak yang membahayakan keselamatan masyarakat dan pelaporan jaringan utilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara pada bulan Februari – April 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menggunakan data atau sampel yang telah diperoleh dalam keadaannya saat ini dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang dan karakteristik suatu kasus ([Arikunto, 2013](#)). Penelitian ini menggunakan salah satu teknik evaluasi dari teori Finsterbusch dan Motz yaitu, evaluasi *Single Program Before-After*. Tujuan dari evaluasi ini ialah untuk mengidentifikasi dampak program dengan mengukur keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program tersebut dilaksanakan.

Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan para informan yaitu, Ketua Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Lagoa, petugas PPSU Kelurahan Lagoa, dan masyarakat Kelurahan Lagoa. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana serta dilakukan keabsahan data triangulasi sumber, yaitu memeriksa serta mencocokkan silang tingkat keandalan informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode dan instrumen dalam penelitian kualitatif ([Moleong, 2013](#)).

HASIL DAN DISKUSI

Dalam pembahasan ini, akan mengkaji tentang evaluasi program PPSU terhadap pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa dengan mempertimbangkan 2 indikator. Pertama, pengelolaan sampah berdasarkan indikator strategi nasional pengelolaan sampah menurut

Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 yang meliputi, pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pemanfaatan sampah, dan pengangkutan sampah ([Perpes No.97 Tahun 2017, 2017](#)). Kedua, ketepatan berdasarkan indikator evaluasi program kebijakan menurut Dunn yang meliputi nilai guna program PPSU ([Dunn, 2003](#)). Kedua aspek tersebut akan dianalisis melalui metode evaluasi program *single program before-after*, dan juga mendasarkan pendapat dari [Hildawati \(2018\)](#) seperti berikut ini:

Pengelolaan Sampah

1. Pengumpulan Sampah

Pengumpulan Sampah merupakan proses fisik pengambilan sampah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, perkantoran, atau area publik untuk selanjutnya diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS) atau fasilitas pengolahan sampah lainnya. Sebelum adanya program PPSU di Kelurahan Lagoa, proses pengumpulan sampah dilakukan oleh masyarakat setempat serta dibantu dengan petugas kebersihan lingkungan yang dikenal sebagai Persada. Masyarakat cenderung membersihkan tumpukan sampah yang terdapat di lingkungan sekitar rumah mereka saja, tidak sampai ke area-area publik. Terkecuali, pada saat dilakukannya kerja bakti bersama Rukun Tetangga atau Rukun Warga. Di sisi lain, peran petugas kebersihan Persada pada saat itu juga masih terbatas. Petugas kebersihan Persada dikoordinasikan langsung oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan ruang lingkup kerja di DKI Jakarta, sehingga cakupan kerja petugas kebersihan Persada masih sangat luas. Dengan ruang lingkup kerja yang luas, para petugas kebersihan Persada dinilai tidak mampu memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh wilayah, apalagi wilayah kelurahan.

Setelah adanya program PPSU di Kelurahan Lagoa, PPSU sudah memiliki koordinator lapangannya sendiri dan ruang lingkup pelaksanaan tugas yang berada langsung di wilayah Kelurahan Lagoa. Ruang lingkup kerja PPSU yang berada di tingkatan kelurahan inilah yang menjadi titik fokus supaya wilayah Kelurahan Lagoa terus terawat dan terkelola seiring berjalannya waktu dan bertambahnya tingkat penduduk. Dalam periode 10 Tahun terakhir (Tahun 2014 – Tahun 2024), penduduk Kelurahan Lagoa meningkat sekitar 11,09% atau sebanyak 8.148 jiwa. Pertambahan penduduk di Kelurahan Lagoa membawa dampak pada aktivitas perekonomian yang semakin pesat. Sehingga, akan mendorong peningkatan volume sampah yang dihasilkan di Kelurahan Lagoa. Maka harus bisa diimbangi dengan upaya solutif oleh para petugas PPSU dalam menjaga

kebersihan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang baik, langkah awal yang dilakukan ialah pengumpulan sampah.

Petugas PPSU yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan sampah adalah PPSU divisi zonasi atau zona. Mereka bertugas membersihkan sampah di lingkungan Kelurahan Lagoa sebanyak 2 kali sehari. Pertama di pagi hari yang dimulai pukul 05.00 wib dan di siang hari pukul 14.00 wib. Terdapat 3 lokasi zona untuk membagi wilayah Kelurahan Lagoa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, hal ini bertujuan agar pengumpulan dan pembersihan sampah di lingkungan Kelurahan Lagoa bisa lebih efektif, efisien, dan merata. Adapun pembagian ruang lingkup zona di Kelurahan Lagoa, sebagai berikut:

Tabel 3.
Pembagian Zona Kelurahan Lagoa

Zona	Ruang Lingkup Zona
Zona 1 (21 petugas)	RW 001, 002, 003, 004, 006, 011, dan 012.
Zona 2 (19 petugas)	RW 008, 009, 010, 014, 015, 016, dan 017.
Zona 3 (20 petugas)	RW 005, 007, 008, 013, 018, dan sedikit wilayah 017.

Sumber: PPSU Kelurahan Lagoa, 2024

Petugas PPSU divisi zona dalam pengumpulan sampah di lingkungan Kelurahan Lagoa dilakukan di atas saluran dan di bawah saluran. Sampah yang terdapat di atas saluran seperti di trotoar atau pinggir jalan. Proses kerjanya ialah dengan melakukan penyapuan terhadap sampah-sampah yang ada di atas saluran secara rutin dan teratur setiap hari. Penyapuan jalan dilakukan para petugas PPSU divisi zona secara manual menggunakan alat serok sampah dan penyapu atau sapu untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut ke dalam tempat sampah atau karung wadah sampah.

Sedangkan, sampah yang terdapat di bawah saluran seperti di selokan atau saluran air biasanya dilakukan secara berkala untuk memastikan saluran tetap bersih dan lancar. Setidaknya pembersihan di bawah saluran dilakukan dua kali dalam seminggu atau sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Proses pengumpulan sampah di bawah saluran dilakukan secara manual dengan menggunakan alat yang sesuai, seperti alat serok sampah atau alat penjaring sampah, cangkul atau sekop, dan tong sampah atau wadah sampah karung untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 2. Proses Pengumpulan Sampah Oleh PPSU Divisi Zona

Dengan adanya pembagian kerja yang jelas, jadwal kerja yang teratur, serta dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendukung lainnya. Petugas PPSU divisi zona Kelurahan Lagoa dapat mengatasi permasalahan pengumpulan sampah di Kelurahan Lagoa dengan baik, yang terbukti bahwa lingkungan menjadi lebih bersih dan terawat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun seharusnya petugas PPSU membersihkan sampah di atas saluran 2 kali sehari, kenyataannya di gang-gang kecil hanya dilakukan sekali saja dan tidak setiap hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pelayanan petugas PPSU divisi zona di Kelurahan Lagoa.

2. Pemilahan Sampah

Kegiatan pemilahan sampah yang dilakukan saat sebelum adanya program PPSU juga masih sangat terbatas sehingga belum berjalan maksimal. Salah satu permasalahan utamanya ialah rendahnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Lagoa tentang pemilahan sampah. Kebiasaan mencampur sampah organik dan anorganik menjadi satu ialah tantangan utama dalam upaya pemilahan sampah. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya infrastruktur yang mendukung proses pemilahan sampah. Hal ini membuat masyarakat Kelurahan Lagoa semakin tidak memperhatikan pentingnya pemilahan sampah dengan baik. Akibatnya, sampah yang bisa dimanfaatkan, sampah pilah organik dan sampah pilah anorganik tercampur menjadi satu, sehingga nantinya akan menyulitkan proses pengolahan sampah selanjutnya.

Setelah adanya program PPSU di Kelurahan Lagoa, pemahaman masyarakat terhadap pemilahan sampah semakin meningkat berkat upaya sosialisasi dan himbauan

yang sering kali dilakukan oleh para petugas PPSU disaat kerja bakti dengan masyarakat ataupun melalui poster yang berisi informasi memilah sampah, khususnya sampah pilah organik dan anorganik. Banyak masyarakat kini mulai terbiasa untuk memilah sampah pilah organik dan anorganik dengan baik di rumah tangganya masing-masing. Petugas PPSU divisi zona juga melakukan pemilahan awal terhadap sampah yang bernilai ekonomi dan sampah yang bernilai non-ekonomi. Kemudian, sampah yang bernilai ekonomi akan dipilah lebih lanjut di bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa oleh petugas PPSU divisi bank sampah terpadu 3R. Pemilahan sampah ini dilakukan hanya menggunakan tenaga manusia yang dibantu oleh beberapa alat pendukung seperti gunting, pemotong atau cutter, pisau, saringan, wadah, karung, dan timbangan. Petugas PPSU juga mengenakan masker dan pelindung tangan selama proses pemilahan untuk melindungi diri dari kontak langsung dengan sampah yang mungkin mengandung bahan beracun atau berbahaya.

Petugas PPSU divisi bank sampah terpadu 3R akan memilah lagi sampah berdasarkan kategorinya seperti, sampah pilah organik daun, sisa makanan, kayu, dll. Sedangkan, untuk sampah pilah anorganik akan dikategorikan seperti, sampah kertas, plastik, logam, dll. Setelah itu, sampah akan dimasukkan ke dalam masing-masing karung berdasarkan kategorinya dan ditimbang untuk menentukan jumlahnya sebelum dimanfaatkan kembali lebih lanjut. Sampah yang sudah ditimbang nantinya dicatat ke dalam laporan harian bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa. Adapun kategori sampah pilah organik dan anorganik seperti berikut ini:

Tabel 4.

Kategori Sampah Pilah Organk dan Anorganik

Jenis Sampah	Kategori Sampah Pilah
Organik	Daun-daun, sisa buah, sisa sayur, sisa makanan, ampas teh, ampas kopi, kayu, dan ranting pohon.
Anorganik	1) Kertas : Putih/HVS, koran, majalah, buku, kardus, dan duplek. 2) Plastik : Kabin, botol plastik (bersih dan kotor), gelas plastik (bersih dan kotor), plastik bening, plastik keras, gelas kopi/warna, mainan, plastik PE, dan drigen. 3) Logam : Alumunium kaleng, alumunium panci, tembaga, timah, seng, stainless, besi, kaleng/krompong, dan alumunium. 4) Beling/Kaca : Botol kecap, botol saus, dan lainnya yang berbahas beling/kaca 5) Gabruk : barang rongsok seperti radio, kipas angin, dan pemutar kaset. 6) Sampah lainnya : Karpet, paralon, karet, kabel, kristal, CD, dan galon.

Sumber: Bank Sampah Terpadu 3R Kelurahan Lagoa

Dengan adanya petugas PPSU dan bank sampah terpadu 3R, proses pemilahan sampah di Kelurahan Lagoa menjadi lebih terkelola dan dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah yang memberikan manfaat meskipun hanya menggunakan tenaga manusia. Selain

itu, volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara dapat dikurangi jumlahnya berkat upaya pemilahan sampah yang baik.

3. Pemanfaatan Sampah

Upaya pemanfaatan sampah yang dilakukan masyarakat, petugas kebersihan, dan pemerintah Kelurahan Lagoa sebelum program PPSU masih sangat rendah. Bank sampah atau kampanye pemanfaatan kembali sampah belum dilakukan dengan optimal dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Sehingga, banyak sampah berharga yang terbuang dan mengakibatkan peningkatan jumlah volume sampah yang diterima oleh tempat penampungan sementara (TPS). Pasca ditetapkan program PPSU, petugas PPSU berperan penting dalam upaya pemanfaatan sampah di Kelurahan Lagoa. Kelurahan Lagoa mendirikan bank sampah terpadu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagai sarana tempat pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh petugas PPSU divisi bank sampah terpadu 3R. Sampah pilah organik dan anorganik yang masih mempunyai nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali di bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa ini.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 3. Bank Sampah Terpadu 3R Kelurahan Lagoa

Sampah pilah organik biasanya akan didaur ulang menjadi kompos dengan melakukan komposting. Namun, sejak tahun 2020 akhir sampai dengan hari ini proses daur ulang sampah pilah organik belum berjalan, dikarenakan alat-alat komposting yang rusak akibat lama tidak terpakai sewaktu rekonstruksi atau renovasi bangunan gedung Kelurahan Lagoa. Sedangkan, sampah pilah anorganik akan dimanfaatkan kembali agar memiliki nilai jual yang lebih baik, dimana pendapatan dari penjualan sampah ini kemudian akan masuk ke bendahara PPSU dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional PPSU lainnya.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 4. Sampah Pilah Siap Jual

Pemerintah Kelurahan Lagoa bersama petugas PPSU juga mulai sering memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai inisiatif pemanfaatan kembali sampah. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya pemanfaatan sampah. Di sisi lain, terdapat juga sebagian masyarakat yang mulai peduli dan telah mengubah perilaku mereka untuk memanfaatkan sampah kembali seperti, membuat pot tanaman dari botol/gelas plastik.

4. Pengangkutan Sampah

Implementasi upaya pengangkutan sampah penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan Kelurahan Lagoa, mengingat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, adanya pertumbuhan penduduk yang pesat di Kelurahan Lagoa akan mempengaruhi aktivitas perekonomian serta peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Maka, sampah-sampah yang sudah terkumpul di wilayah Kelurahan Lagoa harus segera diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS).

Sebelum adanya program PPSU, pengangkutan sampah belum berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil kajian oleh [Effendy & Prabawati \(2020\)](#). Hasil observasi di lapangan disebabkan karena kurangnya jumlah pekerja harian lepas (PHL) pengangkut sampah serta sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana pengangkut sampah yang tersedia terbatas, sehingga seringkali tidak mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, jadwal pengangkutan sampah para PHL juga tidak teratur, sehingga sering kali terjadi keterlambatan atau ketidakpastian dalam pengangkutan sampah yang menyebabkan tumpukan sampah liar yang mengganggu di

beberapa lokasi Kelurahan Lagoa. PHL di Kelurahan Lagoa saat itu mengangkut sampah masyarakat dengan mengenakan tarif sebesar Rp.15.000-30.000 setiap bulannya.

Pasca diluncurkannya program PPSU, pengangkutan sampah di wilayah Kelurahan Lagoa ditangani oleh petugas PPSU divisi gerobak motor atau germot. Petugas PPSU divisi germot memiliki sejumlah fasilitas pendukung seperti, pakaian kerja, armada gerobak motor pengangkut sampah, perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan dan sepatu *safety*, serta alat-alat pendukung lainnya. Petugas PPSU mengangkut sampah dari sampah rumah tangga, sampah di tempat kerja/zona, dan sampah di ruang publik lainnya.

Kendaraan germot di Kelurahan Lagoa berjumlah 10 unit tetapi, yang aktif beroperasi hanya 6 unit germot. Dimana tiap zona ditugaskan sebanyak 2 germot, satu untuk mengangkut sampah yang masih memiliki nilai ekonomi ke bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa dan satunya lagi untuk mengangkut sampah yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi ke TPS. Namun, sampai saat ini petugas harian lepas pengangkut sampah manual juga masih ada. Target sasaran para petugas harian lepas pengangkut sampah ini ialah masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah rumah tangganya, sehingga sampah mereka tidak bisa diangkut petugas PPSU divisi germot.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024)

Gambar 5. Pengangkutan Sampah Yang Bernilai Ekonomi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 6. Pengangkutan Sampah Yang Bernilai Non-Ekonomi

TPS Rawa Badak Utara (RBU) juga sudah melakukan pelebaran atau perluasan area tempat penampungan agar sampah tidak lagi tercecer sampai ke badan jalan serta sudah memiliki fasilitas infrastruktur pendukung yang memadai. Meskipun sudah ada kemajuan dalam proses pengangkutan sampah, tetapi sampai dengan hari ini, baik petugas PPSU divisi germot Kelurahan Lagoa ataupun pihak TPS RBU tidak memiliki data terkait jumlah volume sampah yang disetorkan petugas PPSU Kelurahan Lagoa ke TPS RBU.

Ketepatan

Program PPSU telah membawa sejumlah perubahan penting pada pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Petugas PPSU turut aktif dalam upaya pembersihan sampah di wilayah Kelurahan Lagoa. Hal ini mencakup pengumpulan sampah, pemilahan sampah, pemanfaatan sampah, pengangkutan sampah, dan pengurangan sampah. Lingkungan dan masyarakat Kelurahan Lagoa mendapatkan berbagai manfaat dan dampak dari program PPSU. Manfaat ialah hasil atau luaran positif ataupun keuntungan yang dapat dirasakan langsung dari pelaksanaan program PPSU di Kelurahan Lagoa. Sedangkan dampak ialah perubahan atau efek yang ditimbulkan dari pelaksanaan program PPSU di Kelurahan Lagoa. Berikut ini merupakan manfaat dari pelaksanaan Program PPSU di Kelurahan Lagoa:

1. **Kebersihan Lingkungan.** Lingkungan Kelurahan Lagoa kini menjadi lebih bersih dan terawat setelah pelaksanaan program PPSU di Kelurahan Lagoa. Area publik, taman, dan jalan-jalan di lingkungan Kelurahan Lagoa kini semakin bebas dari tumpukan sampah dibandingkan sebelum adanya program PPSU.
2. **Kelancaran Saluran Air.** Saluran air semakin membaik setelah adanya program PPSU. Sebelum adanya PPSU, tumpukan sampah yang terbengkalai seringkali menyumbat saluran air. Namun, dengan adanya petugas PPSU yang menjaga saluran air secara rutin, potensi penyumbatan saluran air akibat sampah telah berkurang secara signifikan. Pengerukan saluran, perbaikan saluran, dan pemeliharaan rutin lainnya juga dilakukan untuk menjaga kelancaran aliran air dan memperpanjang umur saluran air. Hal ini membantu aliran air lebih lancar dan tidak menimbulkan genangan ketika hujan.
3. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat.** Pasca pelaksanaan Program PPSU di Kelurahan Lagoa, kesadaran masyarakat meningkat secara progresif terhadap proses pengelolaan sampah. Masyarakat mulai memahami bahwa tindakan pengelolaan sampah yang

tampaknya sepele sekalipun, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik, dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap lingkungan. Peningkatan kesadaran masyarakat ini diharapkan akan memungkinkan masyarakat untuk terus berkontribusi aktif dalam menjaga lingkungan Kelurahan Lagoa.

4. Meningkatkan Perekonomian. Pelaksanaan program PPSU Kelurahan Lagoa telah menciptakan peluang untuk mengubah sampah menjadi sumber daya untuk meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, dengan bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa yang mendaur ulang sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik yang dimanfaatkan kembali untuk dijual ke pihak yang membutuhkan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi siapa saja yang melakukan pemanfaatan sampah kembali.

Dari banyaknya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kelurahan Lagoa atas hasil kerja PPSU, adapun dampak yang terjadi akibat pelaksanaan program PPSU di Kelurahan Lagoa, seperti berikut ini:

1. Peningkatan Kesehatan. Salah satu manfaat program PPSU di Kelurahan Lagoa adalah peningkatan kualitas lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat Kelurahan Lagoa. Suasana yang tertata rapi dan bersih dari sampah dapat menurunkan risiko tertular penyakit infeksi seperti kolera, diare, dan penyakit kulit yang disebabkan oleh sampah dan kotoran. Selain itu, udara bersih dapat mengurangi risiko alergi dan masalah pernafasan.
2. Mengurangi Risiko Banjir. Kehadiran program PPSU di Kelurahan Lagoa dapat membantu menjaga saluran air yang lancar sehingga mengurangi risiko terjadinya banjir. Saluran air merupakan bagian penting dari infrastruktur perkotaan yang seringkali terabaikan. Namun, penting untuk diingat bahwa, jika tidak dipelihara dengan baik, saluran air sangat rentan terhadap penyakit dan banjir. Saluran air yang lancar dapat membantu memastikan aliran air tidak tergenang saat hujan deras, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya genangan air dan banjir di lingkungan Kelurahan Lagoa. Selain itu, hal ini dapat membuat infrastruktur saluran air lebih tahan terhadap kerusakan akibat gundukan sampah.
3. Kenyamanan Masyarakat. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan suasana yang tenang, damai, dan mengurangi stres. Ruang-ruang publik di kawasan Kelurahan Lagoa dijaga dan dirawat dengan lebih baik dan bersih sehingga membuat masyarakat

lebih nyaman beraktivitas dan berbaur di tempat-tempat umum. Dengan tidak adanya tumpukan sampah liar yang menghalangi di jalan, masyarakat juga merasa lebih aman saat berlalu-lalang di lingkungan Kelurahan Lagoa.

4. Peningkatan Infrastruktur Dalam Pengelolaan Sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa masih terbatas dan tidak memadai sebelum adanya program PPSU. Namun, dengan adanya Program PPSU, pemerintah mulai meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa, seperti adanya seragam keselamatan bagi petugas kebersihan, bank sampah terpadu 3R, gerobak motor pengangkutan sampah, serta fasilitas pengelolaan sampah lainnya. Proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan efisien dengan perbaikan dan peningkatan infrastruktur.

Meskipun Program PPSU di Kelurahan Lagoa memiliki banyak dampak positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan dari program PPSU di Kelurahan Lagoa, sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan Kurang Merata. Di jalan besar dilakukan pengumpulan sampah dengan rutin setiap hari, sedangkan di gang-gang kecil hanya dilakukan seminggu sekali atau lebih jarang dan tidak konsisten. Akibatnya, gang-gang kecil tertentu lebih sering kotor dibandingkan jalan raya besar, yang lebih sering dibersihkan.
2. Pencatatan Kurang Efektif. Temuan sebelumnya menjelaskan bahwa petugas PPSU di Kelurahan Lagoa belum mendata jumlah volume sampah yang diangkut ke TPS. Akibatnya, informasi mengenai perubahan jumlah volume sampah yang dihasilkan atau disetor ke TPS oleh petugas PPSU Kelurahan Lagoa tidak terdata. Selain itu, sejumlah buku catatan mengenai data produksi sampah pilah organik dan anorganik dari tahun 2015 hingga 2020 juga hilang. Oleh karena itu, informasi yang disimpan mengenai volume dan jenis sampah yang dihasilkan selama periode tersebut tidak dapat dipastikan.
3. Keterhambatan Pengelolaan Sampah Pilah Organik. Pengelolaan sampah pilah organik di Kelurahan Lagoa mengalami hambatan setelah renovasi gedung Kelurahan Lagoa.

PENUTUP

Upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di Kelurahan Lagoa sebelum adanya program PPSU masih memiliki banyak kendala dan hambatan. Hal ini disebabkan karena

kurangnya sumber daya petugas kebersihan, ketidakpastian jadwal kerja petugas kebersihan, kurangnya infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat, dan ketidakmerataan penanganan sampah di wilayah kelurahan hal ini tentu saja berdampak terhadap banyaknya sampah yang tercecer di pinggir jalan, genangan air yang lama dan menyebabkan banjir. Setelah diterapkan program PPSU di Kelurahan Lagoa, upaya pengelolaan sampah mengalami peningkatan signifikan. Terdapat perbaikan dalam hal jumlah tenaga kerja PPSU, pembagian tugas yang lebih terorganisir, peningkatan infrastruktur yang mendukung proses pengelolaan sampah, serta adanya bank sampah terpadu 3R di Kelurahan Lagoa.

Pengelolaan sampah oleh petugas PPSU di Kelurahan Lagoa telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Prosesnya meliputi pengumpulan, pemilahan, pemanfaatan, dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah dilakukan secara rutin di berbagai lokasi. Pemilahan sampah dilakukan di zona dan bank sampah terpadu 3R Kelurahan Lagoa. Pemanfaatan sampah dilakukan dengan memanfaatkan sampah pilah organik dan anorganik. Pengangkutan sampah menggunakan armada gerobak motor, mengirim sampah ekonomis ke bank sampah dan non-ekonomis ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Program PPSU ini membawa perubahan signifikan dalam upaya pengelolaan sampah di Kelurahan Lagoa. Masyarakat langsung merasakan manfaatnya seperti, lingkungan yang lebih bersih dan terawat, saluran air yang lancar, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemilahan dan pemanfaatan sampah, serta adanya peluang baru bagi masyarakat dalam memanfaatkan kembali sampah. Dimana hal tersebut memiliki dampak yang berkelanjutan seperti, peningkatan kesehatan masyarakat, mengurangi risiko banjir, peningkatan kenyamanan masyarakat, serta infrastruktur berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan. Program PPSU di Kelurahan Lagoa harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dalam menghadapi beberapa kendala seperti, pelaksanaan pengumpulan sampah yang kurang merata, sistem pencatatan sampah yang kurang efektif, dan hambatan dalam pengelolaan sampah pilah organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, M. F., & Mohi, K. W. (2015). *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ariawan, I. W. D., Indrayani, L., & Irwansyah, M. R. (2020). [Evaluasi Program Bank Sampah Sibuh Nirmala Di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli](#). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(1).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kota Jakarta Utara. (2022). [Kota Jakarta Utara Dalam Angka 2022](#). BPS Kota Jakarta Utara.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2024). [Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka 2024](#). BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisa Kebijakan Publik (2nd ed.)*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama. (2) (3)
- Effendy, W. P., & Prabawati, I. (2020). [Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Organik Menggunakan Black Soldier Fly \(BSF\) Di Pusat Daur Ulang Jambangan Kota Surabaya](#). *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Habibi, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. In *Universitas Islam Riau*. Islam Riau.
- Hildawati. (2018). [Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Kecamatan Di Kota Dumai \(Studi Pasca Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan di Bidang Persampahan\)](#). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 332–348. (2)
- Karolyn, M. (2021). [Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum \(PPSU\) Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di kelurahan Meruya Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat](#). *Journal Ardhikari*, 1(02), 52–64.
- Khasanah, N. F. (2023). [5 Provinsi Penghasil Sampah terbanyak di Indonesia, Mayoritas dari Pulau Jawa! Zonaebt](#). <https://zonaebt.com/lingkungan/5-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia-mayoritas-dari-pulau-jawa/>
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustari, N. (2015). [Pemahaman Kebijakan Publik \(Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik\)](#). In *Kebijakan Publik Deliberatif*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Palmer, J. (1999). [Public policy and program evaluation](#). *American Journal of Evaluation*.
- Pergub Prov DKI Jakarta No.122 Tahun 2017. (2017). [Peraturan Gubernur DKI Jakarta](#)

[Nomor 122 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.](#)

Pergub Prov DKI Jakarta No.169 Tahun 2015. (2015). [Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.](#)

Perpes No.97 Tahun 2017. (2017). [Peraturan Presiden No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. \(2\)](#)

SIPSN MLHK. (2023). [Timbulan Sampah.](#)
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

Trevisan, A.P., & Bellen, H.M. (2008). [Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção.](#)

Vedung, E. (1997). [Public Policy and Program Evaluation.](#)

Venetoklis, T. (2002). [Public Policy Evaluation: Introduction to Quantitative Methodologies.](#) *The research reports.*

Wandira, A. (2022). [Evaluasi Program Pengolahan Bank Sampah Di Tps 3R KSM Intan Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak Deli Serdang.](#) Medan Area.

Wibawa, S. (1994). [Evaluasi Kebijakan Publik.](#) Jakarta: Intermedia.

Zhidebekkyzy A., Temerbulatova Z., Bilan Y. (2022) The Improvement Of The Waste Management System In Kazakhstan: Impact Evaluation. Polish Journal Of Management Studies, Vol.25 No.2